

**PERANAN PEMERINTAH DESA ANABANNAE DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

Fryza Fyngky¹, Abdul Jabbar², Akhyaruddin Hakim³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: fryzafyngkyanwar14@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the extent of the village government's role in poverty alleviation efforts in terms of several existing programs in Anabannae Village, Pitu Riawa District, based on indicators, as well as what obstacles hinder this role. The research method used is a qualitative method accompanied by an individual phenomenological approach, where the data source is obtained through an interview and documentation process. Data analysis was carried out based on several stages, namely data reduction, data classification, data description, and drawing conclusions. The results of this research show that (4) the role in poverty alleviation has not been fulfilled optimally because there are several obstacles, namely community participation, low skills and facilities.

Keywords: Role, Poverty, Program.

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan ditinjau dari beberapa program yang ada di Desa Anabannae Kecamatan Pitu Riawa, berdasarkan indikator-indikator, serta hambatan apa yang menjadi terhambatnya peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif disertai dengan pendekatan fenomenologi individu, dimana sumber datanya didapatkan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari (4) peran dalam penanggulangan kemiskinan sepenuhnya belum terpenuhi secara optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan yaitu partisipasi masyarakat, rendahnya keterampilan dan fasilitas.

Kata kunci: Peran, kemiskinan, program

PENDAHULUAN

Secara umum kata pemerintah adalah komponen dari orang-orang yang memiliki suatu keajaiban yang dimana didalamnya terdiri dari amanat suatu warga dalam melaksanakan tugas. Pemerintah merujuk pada struktur dan proses yang digunakan untuk mengelola suatu wilayah, mulai dari wilayah pemerintah provinsi sampai wilayah pemerintah desa sekalipun. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dijelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu target utama pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah yaitu kesejahteraan pemerintah desa sebagai penyelenggara di wilayah lebih kecil naungannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam kehidupan sehari-hari pemerintah sangat memiliki wewenang dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya ruang lingkup pemerintah bukan hanya berfokus kepada pemerintah desa tetapi di setiap wilayah memiliki perangkat pemerintah tersendiri dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu pemerintah seharusnya memperbaiki dari tingkat pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah sekelompok orang-orang yang ada di pada suatu tempat atau wilayah menjalankan suatu amanah yang telah ditunjuk untuk melaksanakan beberapa wewenang atau tugas sesuai peraturan yang ada. Pemerintah desa secara umum berkaitan dengan perangkat desa dimana perangkat desa merupakan lembaga pemerintah di tingkat desa yang mempunyai ide atau batasan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



tertentu dalam mengatur serta mengurus kepentingan warga dalam satu wilayah pemerintah desa sangat berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Salah satu fenomena yang sering terjadi bahkan bisa kita katakan bahwa kemiskinan tidak pernah punah di berbagai negara bahkan di tingkat pemerintahan desa. Aspek penting dalam kemiskinan meliputi hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, akses layanan dasar, serta siklus kemiskinan. Pada dasarnya pemerintah desa memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan kebutuhan dan tantangan penduduk di desa memiliki hak dan kewajiban dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah desa pada umumnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan sosial dalam wilayah-wilayah tertentu yang dimana proses pencapaian kesejahteraan sosial merujuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 yang berfokus kepada pembahasan sosial masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial yang meliputi dimensi pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, serta agama, dan sosial lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ada beberapa upaya pemerintah setempat dalam mewujudkan hal tersebut yang salah satunya dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan wilayah setempat. Berdasarkan jumlah kartu keluarga (KK) pada Desa Anabanna ini mengalami pengurangan 2 tahun terakhir dikarenakan dominan pindah. Pada tahun 2021-2022 jumlah kartu keluarga (KK), yaitu 397 mengalami pengurangan sekitar 13 kartu keluarga (KK). Adanya pengurangan penduduk biasanya melibatkan dinamika kompleks ekonomi, sosial, dan demografi. Kemiskinan juga sangat tinggi pengaruhnya terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan sendiri. Masyarakat miskin berada dalam tekanan akan mencari daerah atau lahan kritis kawasan konservasi sebagai tempatnya tempat tinggal.

Beberapa aspek kemiskinan bisa kita ketahui bahwa masalah yang sangat kompleks dan saling berkaitan yaitu masalah multidimensional, perlunya pendekatan holistik, perlunya dukungan sosial, serta program-program yang dapat memberdayakan masyarakat, dan kolaborasi kesadaran masyarakat. Perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan kenyataan yang ada dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial. Pada hal tersebut peranan pemerintah desa berfokus kepada bagaimana kolaborasi tersebut mencapai tujuan penting dalam segi penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi entitas yang mempunyai akses langsung ke warga di tingkat lokal peranan dasar pemerintah desa ada baiknya bagaimana fokus ke beberapa hal yaitu penyediaan layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, penyuluhan dan pendidikan, partisipatif, perlindungan sosial, pengawasan, dan akuntabilitas.

METODE

Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana menurut Sugiyono (2018), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (Tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Filsafat postpositivisme adalah suatu pendekatan filosofis terhadap ilmu pengetahuan yang muncul sebagai tanggapan terhadap positivisme tradisional. Positivisme tradisional menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan sepenuhnya pada pengamatan dan pengujian empiris, serta menekankan objektivitas mutlak dan ketidakberpihakan ilmu pengetahuan. Pengumpulan data kualitatif dan analisisnya melibatkan proses pengumpulan informasi deskriptif dan non-numeric, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan makna di balik fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan studi fenomenologi. Studi fenomenologi tidaklah berfokus terhadap kehidupan individu tetapi lebih pada konsep atau fenomena, serta jenis kajian ini mencoba memahami arti dari berbagai pengalaman individu mengenai fenomena yang dialami. Fenomenologi adalah studi pada bidang ilmu filsafat yang yang mempelajari manusia sebagai fenomena yang biasanya dihubungkan dengan ilmu hermeneutika yang dimaknai

dengan suatu ilmu yang mempelajari tentang makna dari fenomena permasalahan pada setiap individu maupun kelompok.

PEMBAHASAN

Peran Desa Anabannaë Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan kelurahan. Pemerintah dapat melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Melalui peran-peran tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar tetapi juga merata hingga ke wilayah pedesaan dan kelurahan, sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan aturan untuk mengimbangi pelaksanaan pembangunan. Sehubungan dengan implementasi pemberdayaan, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala sesuatunya. Dalam teorinya, Suhardono menjelaskan pemerintah desa berperan sebagai regulator artinya kemampuan pemerintah desa untuk menetapkan arah dan standar yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan. Pemerintahan Desa Anabannaë juga selalu mengatur proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang diawali dengan membuat ajuan kepada sekretaris daerah kemudian pengadaan sumber daya yang biasanya melibatkan masyarakat Desa Anabannaë sendiri sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan serta pelaksanaan proyeknya yang biasanya pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. Program peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Anabannaë ini adalah dengan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah yang memberikan uang tunai atau berbagai jenis bantuan lainnya kepada masyarakat miskin baik secara bersyarat maupun tidak bersyarat. Sejauh ini upaya pemerintah Desa Anabannaë Kecamatan Pitu Riawa dampaknya hanya merealisasikan bantuan pemerintah dari pusat saja.

Peran sebagai dinamisator artinya Program penyuluhan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan harus sesuai dengan situasi dan kebutuhan, serta kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan setiap pelatihan yang diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. indikator pemerintah sebagai peran pemerintah sebagai dinamisator masih sangat kurang karena hal tersebut bermasalah pada partisipasi masyarakat sendiri, padahal untuk melangsungkan suatu dinamika desa itu tersendiri harus terdapat juga peran masyarakat setempat. Desa Anabannaë memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan, walaupun dari sudut pandang penulis masih kurang tetapi pemerintah desa Anabannaë sendiri mengupayakan dalam bentuk pendampingan dalam segi program pemerintah pusat dengan mengukur keberhasilan program dari segi verifikasi data kemiskinan dari tahun sebelumnya. Dalam rangka mendorong dan menjaga dinamika pembangunan maka peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan keterlibatan masyarakat apabila terjadi hambatan dalam proses pembangunan. Sebagai penggerak, pemerintah berkontribusi dengan memberikan bimbingan atau arahan yang luas dan efektif kepada masyarakat, dan hal tersebut membutuhkan pengarahannya serta bimbingan atau pedoman. Pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat melalui tim penyuluh dan organisasi tertentu.

Peran sebagai fasilitator artinya Fasilitator merupakan pelaksana kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat atau agen perubahan (seseorang atas nama pemerintah) untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam mengambil inovasi. Sebagai fasilitator, pemerintah desa memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana dengan memberikan pendanaan atau permodalan serta pemberian pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendampingi bidang melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, dan pada bidang tertentu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa peran pemerintah Desa Anabannaë sebagai fasilitator di dalam menanggulangi masalah sangat diperlukan di Desa Anabannaë agar pencapaian sumber daya masyarakat yang terminimalisir dari

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



401



kemiskinan bisa terwujud nyata sekaligus masyarakat semakin mengerti akan pentingnya keluar dari masalah kemiskinan. Sebagai fasilitator Pemerintah Desa Anabanna sudah seharusnya memberikan pendampingan yang konsisten dan menyediakan fasilitas misalnya dengan mendirikan BUMN dengan tujuan menunjang masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan pemberdayaan sehingga dengan adanya pendampingan atas setiap program yang dijalankan pemerintah Desa Anabanna, maka masyarakat akan lebih menjadi mengerti akan pentingnya manfaat pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Anabanna.

Peran sebagai katalisator artinya Peran pemerintah dalam tugasnya sebagai katalisator harus juga memperhatikan kesenjangan sosial, wilayah, dan minimnya kualitas sumber daya yang ada salah satunya dalam segi tingkat pendidikan itu sendiri. Terkadang tingkat pendidikan menjadi salah satu masuknya kategori kemiskinan. Jenjang pendidikan pada umumnya terkadang menjadi salah satu harapan dalam menunjang penanggulangan kemiskinan. Penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 219 orang sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 304 orang. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 269 orang dan penduduk dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 7 orang, sedangkan pada pendidikan strata dua (S2) hanya ada 1 orang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang ada terdapat 530 untuk jumlah keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen pemerintah (Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) termasuk partisipasi dari tokoh masyarakat (pendidikan dan agama) untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Hambatan Dalam Penanggulangan Ditinjau Dari Program

Tidak jarang ada hambatan yang menghalangi upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Pemerintah Desa Anabanna menghadapi beberapa tantangan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan tertentu, termasuk pemutakhiran atau update data DTKS. Proses memperbarui informasi dalam Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disebut pemutakhiran atau update data DTKS. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi saat program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Anabanna sebagaimana dari uraian pembahasan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan peran seseorang atau kelompok masyarakat yang berupa kegiatan, pernyataan maupun masukan dalam proses pembangunan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat desa, Pemerintah Desa mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat Desa. Dalam kegiatan pemberdayaan dengan memberikan penyuluhan/pelatihan yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat yang menghadirkan beberapa tokoh untuk membantu kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat mengikuti kegiatan tersebut, akan tetapi hasil pelatihan/penyuluhan yang diberikan kurang maksimal karena tidak semua masyarakat yang perlu diberdayakan hadir dalam kegiatan tersebut karena adanya kesibukan lain yang dirasa lebih penting serta masyarakat banyak yang tidak disiplin, menganggap kurang perlu dengan kegiatan yang harus dilakukan dan masih merasa malu untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

Rendahnya keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan atau mengerjakan suatu tugas dengan baik. Tingkat keterampilan yang tinggi mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Keterampilan dalam mengelola sektor usaha yang dilakukan petani Desa masih sangat kurang, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional daripada cara modern dalam berwirausaha. Tingkat keterampilan masyarakat petani di Desa dalam sektor usaha masih belum optimal. Hal tersebut diketahui dari peran pemerintah yang belum bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berubah dan memperbaiki diri.

Ketersediaan fasilitas

Ketersediaan fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas pendukung dalam menjalankan fungsinya, sehingga dengan tersedianya fasilitas tersebut maka dapat menunjang kelancaran suatu kegiatan yang akan dilakukan, salah satunya yaitu ketersediaan kantor desa atau aula untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan tempat pelaksanaan tugas dalam mengelola berbagai kegiatan. Ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi peran pemerintah dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai dalam kegiatan pembangunan seperti pemberdayaan masyarakat atau pertemuan musyawarah serta penyuluhan/pelatihan yang dilaksanakan di Desa membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi kurang efektif. Keterbatasan fasilitas karena peralatan yang belum dimiliki pemerintah desa hanya bisa menyediakan fasilitas dengan jumlah yang terbatas untuk mendukung selama kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diadakan di Desa.

Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Anabannae Dalam Mengatasi Kemiskinan

1. Memberi arah pada proses sosialisasi

Dalam mengentaskan kemiskinan, dimana pemerintah dituntut untuk menyusun kebijakan anggaran yang efisien dan efektif agar dapat mengangkat taraf hidup masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan atau dikenal dengan istilah anggaran pro rakyat. Pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh siapapun yang berada di pemerintahan dan lembaga Negara sesuai konstitusi UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga dipertegas dalam pasal 28 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

Masyarakat yang mampu membangun lingkungannya yaitu masyarakat yang sadar akan kebutuhannya dengan menggali potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu serta mempertahankan kearifan lokal yang ada di suatu wilayah dengan berbagai cara dan teknik untuk menjadi suatu makanan pokok serta mengembangkan berbagai olahan dari kearifan lokal yang dimiliki. Hal demikian merupakan salah satu tradisi mempertahankan kebutuhan hidup masyarakat yang penting untuk diwarisi oleh generasi selanjutnya dalam upaya penurunan angka kemiskinan di desa. Demikian juga di Desa Anabannae, yang merupakan daerah agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga, dengan jenis pekerjaan tersebut, dimana pemerintah desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakatnya untuk bagaimana cara memanfaatkan potensi yang ada untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dengan cara mengolah hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mengharapkan bantuan dari pemerintah.

3. Mempersatukan kelompok atau masyarakat

Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Mengingat hal tersebut, pemerintah desa semestinya harus mampu menyatukan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan di desa. Demikian juga dengan Desa Anabannae yang sampai saat ini masih disibukkan dengan pengentasan kemiskinan di desa. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang terbaik dalam menangani hal tersebut, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong membangun perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola bersama-sama potensi sumber daya alam dan jenis usaha desa.

Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Melestarikan kehidupan masyarakat penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan memanfaatkan keunggulan lokal adalah salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan. Konsepnya adalah membangun desa secara terintegrasi. Demikian juga di Desa Anabanae, dimana dengan melestarikan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan akan mampu mengurangi angka kemiskinan di desa. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Desa Anabanae dalam peranannya meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan sebagai salah satu sistem pengendalian dalam meningkatkan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai 4 indikator pemerintah pada Desa Anabanae berupa, (1) peran pemerintah sebagai regulator di Desa Anabanae Kecamatan Pitu Riawa, masih merealisasikan program pemerintahan pusat yang berpatokan pada kebijakan Permendes PDTT No. 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional dan fokus penggunaan dana desa tahun 2024 yang dimana dalam mengatasi kemiskinan di Desa Anabanae uni adalah dengan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunas (BLT) yang memberikan uang tunai atau berbagai jenis bantuan lainnya kepada masyarakat miskin baik secara bersyarat maupun tidak bersyarat, (2) peran pemerintah sebagai peran dinamisator masih sangat kurang karena hal tersebut bermasalah pada partisipasi masyarakat sendiri, padahal untuk melangsungkan suatu dinamika desa itu sendiri harus terdapat juga peran masyarakat setempat, (3) Desa Anabanae sebagai fasilitator dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Anabanae masih belum optimal, dikarenakan aparatur pemerintah Desa Anabanae kurang memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama ketika masyarakat miskin tersebut memperoleh bantuan dari Pemerintah Desa Anabanae melalui BMUG, dan (4) indikator pemerintah Desa Anabanae sebagai katalisator berupaya mengeluarkan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan setempat yang dimana pelatihan tersebut masih memerlukan modal yang cukup serius. Kemudian Pemerintah Desa Anabanae dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dibantu oleh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

REFERENSI

- Agus Triono, Tomi, and Reno Candra Sangaji. 2023. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal of Society Bridge* 1(1):59–67. doi: 10.59012/jsb.v1i1.5.
- Akib, K. 2023. "Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ...* 3(2):1981–83.
- Alia Akhmad, Khabib. 2021. "Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2(6):173–81.
- Amami, Riza, and Kiki Asmara. 2022. "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Ekobistek* 11:48–54. doi: 10.35134/ekobistek.v11i2.297.
- Awwahah, Fitrah Aisyah, and Chaidir Iswanaji. 2022. "Peran LAZiS Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah." *Jurnal Syntax Admiration* 3(4):674–85. doi: 10.46799/jsa.v3i4.416.
- Deryane, I. 2023. "Analisa Dampak Kemiskinan Akibat Faktor Konsumsi, Transportasi, Dan Hunian." *Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan ...* 7(2):164–68.
- Fadillah, Abi. 2021. "Marko Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Analisis Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Dan Indikator Makroekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia)." *Ascarya Journal Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1(2):186–203.

- Firdaus, Riska. 2020. "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara." *Publik Administrasi* 3(1):32–40.
- Indika, M., Y. Marliza, and A. Marisa. 2022. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara." *Jurnal Sistem Informasi ...* 2(1).
- Iswanto, Denny, Setyani Irmawati, Benedictus Riandoko, Adi Kurniawan, FX Sugiyanto, Syaparuddin dan Siti Hodijah Indris, Kamal, Sutarno, Mudrajad Kuncoro, Nurhuda, Rama, Juergen JE Manoppo, Daisy SM Engka, Steeva YL Tumangkeng, D. I. Provinsi Riau, Dalam Kawasan, Kedungsepur Tahun, Putra Fajar Utama, and Lili Masli. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(1):1–14.
- Jacobus, Elvira Handayani, Paulus .. Kindangen, and Een N. Walewangko. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(7):86–103. doi: 10.35794/jpekd.19900.19.7.2018.
- Julifar, Septian, Sukendi Sukendi, and Yusni Ikhwan Siregar. 2020. "Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dan Penyedia Layanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 14(1):80. doi: 10.31258/jil.14.1.p.80-86.
- Kurniawati, Rini, and Khosiah Khosiah. 2019. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3(1). doi: 10.58258/jisip.v3i1.818.
- Made Ariasih, Ni Luh, and Ni Nyoman Yuliarmi. 2021. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1(7):821–39. doi: 10.59141/cerdika.v1i7.131.
- Masdi, Masdi, Nanda Yuniza, and Nurkhalis Nurkhalis. 2023. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14(1):101–13. doi: 10.22373/jep.v14i1.781.
- Mulya Lestari, Sri, and Yayuk Eko Wahyuningsih. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES)." *Jurnal Sosial Sains* 1(10):1254–61. doi: 10.59188/jurnalsosains.v1i10.235.
- Mulyasari, Andini. 2018. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto." *Economics Development Analysis Journal* 5(4):368–76. doi: 10.15294/edaj.v5i4.22174.
- Nafi'ah, Bariyyatin. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):953–60. doi: 10.29040/jiei.v7i2.2206.
- Nippi, Andi Tenri, and Andi Pananrangi M. 2019. "KELOMPOK TANI (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru)." *Meraja Journal* 2(1):35–47.
- PATEDA, YOLANDA-, Vecky A. J. Masinambow, and Tri Oldy Rotinsulu. 2019. "Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(3):1–17. doi: 10.35794/jpekd.16455.19.3.2017.
- Pattiasina, Sharon Michelle O. 2021. "Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4(1):125–40. doi: 10.34307/b.v4i1.238.
- Pramu, Septian, and Dinar Melani Hutajulu. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999 – 2020." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 3(2):379–90. doi: 10.55047/transekonomika.v3i2.393.
- Purba, Andiopenta. 2023. "Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Ungkapan Prolog Bahasa Melayu Jambi Sebagai Mata Kuliah Ciri Kedaerahan Pada Program Studi

- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jambi.” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 13(1):309. doi: 10.33087/dikdaya.v13i1.438.
- Purnomo, Sodik Dwi, Minadi Wijaya, and Heri Setiawan. 2021. “Infrastruktur Dan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (MIMB)* 1(1):1–10.
- Rachmawati, Meida. 2020. “Kontribusi Sektor UMKM Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1(7):1–13.
- Safira, Rindi, Masdelima Hasibuan, and Khairina Tambunan. 2021. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2022.” *Triangle: Journal of Management, Accounting, Economic and Business* 2(4):574–87.
- Setiawan, Johan, and Wahyu Ida Permatasari. 2018. “SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 1950- 1959 Johan Setiawan.” 6.
- Suhartono, Suhartono, Nurarini Arsyad, and Finna Amelia. 2020. “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada Pemerintah Desa Tonasa Dan Desa Mamampang, Tombolo Pao).” *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 3(3):336–53. doi: 10.31842/jurnalinobis.v3i3.142.
- Syahri, Dinda, and Yesy Gustiara. 2020. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 1(1):34–43.
- Wibowo, Eko Agung, and Alfia Oktivalerina. 2022. “Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia Pada 2010 - 2018.” *Bappenas Working Papers* 5(1):97–119. doi: 10.47266/bwp.v5i1.117.
- Zahrotussolichah, Sinta, and Yustirania Septiani. 2022. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur: Pendekatan Error Correction Model.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2(6):153–66. doi: 10.55047/transekonomika.v2i6.280.